

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa masing-masing negara berkewajiban untuk melayani warganya dan memenuhi hak dan kebutuhannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Satu formulir pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan instansi pemerintah menjelaskan akuntabilitas publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009).

Manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mengklarifikasi peran pengendalian internal tercantum dalam Pasal 47 ayat 2. COSO yang diselenggarakan pada tahun 1985 bertujuan untuk memberikan pemikiran yang berhubungan dengan manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kota Surakarta telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2013-2016.

Berangkat dari hal itu menimbulkan pertanggungjawaban Pemkot Surakarta menjadi hal penting yang harus diperhatikan, sehingga akuntabilitas yang bisa diraih perlu dilakukan monitoring. Pemantauan keuangan negara yang baik diharapkan bisa memberikan kepastian bahwa semua uang yang diterima akan digunakan maksimal sesuai dengan anggaran yang telah dibuat (Santoso & Pambelum, 2008).

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pemantauan adalah auditor internal atau biasa disebut auditor inspektorat sehingga masalah pertanggungjawaban pemerintah kota Surakarta berdampak pada tugas dan fungsi inspektorat sebagai monitor apakah auditor telah menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak. Peran auditor sangat besar terkait dengan peningkatan akuntabilitas kota Surakarta, sehingga setiap pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara profesional untuk mencapai pemantauan yang ideal (Wardayati & Arif, 2017).

Auditor yang baik akan bekerja secara profesional untuk menghasilkan output yang baik, yaitu pemantauan anggaran pemerintah sehingga realisasi program sesuai dengan anggaran. Auditor profesional dipengaruhi oleh banyak faktor, Wardayati & Arif (2017) menyatakan bahwa auditor profesional dipengaruhi oleh peringkat individu atau karakteristik tertentu dari auditor, pengalaman, dan ukuran kantor tempat auditor bekerja. COSO menggambarkan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendaliannya dapat dipenuhi. Lima komponen pengendalian internal tersebut yaitu: lingkungan pengendalian internal,

manajemen penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan (Penatua, Beasley, Arens, & Jusuf, 2014).

Lingkungan pengendalian adalah suatu atmosfir individu pada suatu organisasi dalam melakukan kegiatan dan melaksanakan tanggungjawab atas pengendalian di bidangnya. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur organisasi (Boynton *et al*, 2002:379). Lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kegagalan efektivitas komponen lainnya (BPKP, 2008: 4).

Faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian adalah integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, filosofi dan gaya manajemen, cara manajemen membagi wewenang dan tanggung jawab, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan dengan pihak terkait. Faktor-faktor lingkungan organisasi harus dikendalikan dan dikelola dengan baik. Bila faktor-faktor tersebut telah dikendalikan, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif yang kemudian menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima yang diberikan oleh seorang auditor (Tadeko, 2017).

Lingkungan pengendalian akan mempengaruhi auditor dalam bertindak profesional. Hal ini karena komitmen dari inspektorat terkait dengan nilai, etika, integritas, kebijakan kepegawaian, dan struktur organisasi (COSO, 2013). Febriana, Wardayati & Prasetyo (2017) menyatakan bahwa semakin baik

lingkungan pengendalian yang dimiliki auditor yang bekerja di Inspektorat akan mampu meningkatkan akuntabilitas. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan pengendalian merupakan suatu faktor yang menentukan akuntabilitas.

Penilaian risiko manajemen sebagai suatu bagian dalam merancang dan melaksanakan pengendalian internal untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan dalam suatu organisasi atau kemungkinan ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah (Rama dan Jones, 2008). Auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Pengelolaan risiko merupakan pengelolaan atas ketidakpastian yang dilakukan oleh auditor (BPKP, 2008: 7). Dengan penilaian risiko, auditor mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang relevan dalam pencapaian sasaran serta menentukan langkah-langkah bagaimana risiko tersebut ditangani (Tadeko, 2017). Febriana, Wardayati & Prasetyo (2017) menyatakan bahwa semakin baik penilaian risiko manajemen yang dimiliki auditor yang bekerja di Inspektorat, akan mampu meningkatkan akuntabilitas. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa faktor penilaian risiko manajemen yang diukur melalui identifikasi, evaluasi dan penentuan tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani risiko merupakan suatu faktor yang menentukan akuntabilitas.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Rama dan Jones, 2008). Aktivitas pengendalian mencakup berbagai pengendalian yang bersifat detektif dan preventif. Setelah terdeteksi adanya penyimpangan atau

kelemahan oleh auditor, kemudian harus dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian yang berjalan dengan baik, akan memastikan bahwa unsur-unsur organisasi seperti sumber daya manusia dan peralatan akan dengan maksimal diarahkan dan digunakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (BPKP, 2008: 5). Tadeko (2017) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian yang baik berarti kegiatan pengendalian mengutamakan pelaksanaannya pada kegiatan pokok instansi, yaitu pelayanan. Kegiatan pengendalian juga berada pada keseimbangan antara pengendalian deteksi dan pengendalian preventif (BPKP, 2008: 5). Dengan adanya keseimbangan tersebut dapat menciptakan kelancaran dalam kegiatan pelayanan publik.

Informasi diartikan sebagai data yang telah diolah dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (BPKP, 2008: 3). Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk simbol atau lambang tertentu untuk mendapatkan umpan balik (Suwanda dan Dailibas, 2013: 9). Dengan demikian, informasi dan komunikasi merupakan proses pengumpulan dan penyampaian atau pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk akuntabilitas aset-aset yang terkait. Manfaatnya

adalah untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit, serta meningkatkan mutu audit (Elder *et al.* 2013).

Pengawasan pengendalian intern adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu (BPKP, 2008: 3). Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan pengendalian dijalankan sesuai tujuannya (Elder *et al.* 2013). Oleh sebab itu, dalam pengendalian internal diperlukan informasi dan komunikasi serta pengawasan yang baik dikarenakan baik buruknya pemerintahan dipengaruhi oleh hal tersebut dan berdampak pula terhadap akuntabilitas.

Febriana, Wardayati & Prasetyo (2017) menyatakan bahwa informasi komunikasi, dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang. Tadeko (2017) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan SKPD Kabupaten Banggai, sedangkan pengawasan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan SKPD Kabupaten Banggai. Kaltsum & Rohman (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dimana variabel kontrol internal merupakan variabel intervening. Santoso (2016) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas peneliti ingin menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Febriana, Wardayati & Prasetyo (2017) yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Jombang. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Surakarta. Judul penelitian ini adalah” **Pengaruh Faktor-Faktor Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Auditor di Inspektorat Kota Surakarta**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kota Surakarta?
2. Apakah ada pengaruh penilaian risiko manajemen terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kota Surakarta?
3. Apakah ada pengaruh aktifitas pengendalian terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kota Surakarta?
4. Apakah ada pengaruh informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kota Surakarta?
5. Apakah ada pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas auditor.

2. Untuk menganalisis pengaruh penilaian risiko manajemen terhadap akuntabilitas auditor.
3. Untuk menganalisis pengaruh aktifitas pengendalian terhadap akuntabilitas auditor.
4. Untuk menganalisis pengaruh informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas auditor.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas auditor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas audit yang ada di Inspektorat Kota Surakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor pengendalian intern.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.



## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini saya harapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **b. Bagi Auditor Inspektorat Kota Surakarta**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu hasil audit, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja auditor.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan.

#### BAB IV ANALISA DATA

Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.